

Bupati Klaten Tinjau Banjir di Mawen

KLATEN (KR) - Bupati Klaten Sri Mulyani meninjau banjir di Dukuh Mawen, Desa Pesu, Kecamatan Wedi, Minggu (7/2). Banjir akibat tanggul jebol sisi utara Sungai Slegrengan, yang melintasi Dukuh Mawen. Akibat banjir tersebut, Jalan Raya Pesu ñ Kragilan Gantiwarno rusak parah dan Jembatan di Dukuh Mawen ditutup. Warga Kragilan atau warga dari Gunungkidul yang akan ke Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten harus melintasi Jembatan di Dukuh Cendol, Kragilan.

Jalan aspal di Pesu yang diterjang banjir juga rusak parah. Bupati bersama para relawan, anggota TNI dan Polri juga ikut gotong royong menguras air yang masuk di dalam rumah warga. Bupati juga meninjau langsung tanggul jebol yang kini masih dalam perbaikan oleh jajaran relawan dan aparat TNI dan Polri.

Sri Mulyani mengatakan, banjir yang terjadi di Pesu, Kecamatan Wedi pada Minggu, 7 Pebruari 2021 memasuki hari ke empat. Banjir yang diakibatkan tanggul Sungai Slegrengan jebol terjadi pada Kamis (4/2) akibat hujan deras sejak Senin (1/2). Sri Mulyani berterima kasih kepada para relawan baik dari Kokam Muhammadiyah, Banser NU, MTA, LDII dan relawan lain baik dari Klaten maupun relawan dari luar Kabupaten Klaten yang telah membantu penanganan banjir di Desa Pesu.

Masih dalam pandemi covid-19, Bupati berpesan agar para relawan dan warga korban banjir tetap melakukan protokol kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan bantuan di Balai Desa Pesu untuk korban banjir dan akomOdasi dapur umum untuk para relawan yang membantu penanganan banjir di Desa Pesu. (Sit)



KR-Sri Warsiti

Bupati Klaten Sri Mulyani beserta rombongan meninjau daerah-daerah yang terkena banjir.



KR-Chandra AN

JALAN Padi Raya Perumahan Genuk Indah Semarang, Minggu (7/2) masih terendam banjir setinggi 60 sentimeter. Air yang masuk ke rumah-rumah warga ada yang mencapai 1 meter karena rumah lebih rendah dari jalannya. Warga perumahan masih banyak yang terjebak banjir dan tak bisa ke luar rumah. Apalagi listrik dipadamkan PLN untuk menghindari konsleting arus listrik, sehingga 2 hari sejak Sabtu (6/2) kawasan Genuk Indah gelap gulita sewaktu malam tanpa listrik.

KANIT LAKA SATLANTAS POLRES GROBOGAN

Tiblantas, Kurangi Angka Kecelakaan

GROBOGOGAN (KR) - Perlengkapan kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil tidak boleh diabaikan demi keamanan dan keselamatan pengendara. Perlengkapan sebagaimana dimaksud antara lain lampu utama, lampu rem, lampu zign, dan kaca spion wajib dipasang. Selain itu, bagi pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm pengaman, sedangkan pengemudi mobil wajib pula memakai sabuk pengaman.

Hal-hal itulah yang menjadi fokus perhatian Kepala Unit Laka Lantas (Kanit Laka) Satlantas Polres Grobogan Iptu Setyo Budi kepada *KR*, Senin (8/2). Setyo Budi menjelaskan pihaknya sedang melakukan edukasi kepada masyarakat tentang perlunya masalah perlengkapan kendaraan bermotor. Sepintas memang masalah perlengkapan kendaraan bermotor, seakan-akan merupakan hal yang ‘sepele’. Tetapi sesungguhnya hal itu sangat penting demi menjaga keamanan dan keselamatan.

“Semisal kaca spion, bermanfaat untuk bisa mengetahui situasi di belaka-

kang pengendara, terutama ketika hendak berhenti atau menyeberang jalan,” jelas Setyo Budi. Demikian pula lampu zign, sebagai penanda ke arah mana sepeda motor hendak berbelok. Jika tidak menggunakan lampu zign, terkadang sepeda motor yang berada di belakangnya ‘gugup’ dan bisa menyebabkan terjadinya tabrakan.

Setyo Budi menyampaikan di wilayah hukum Polres Grobogan, acapkali terjadi kecelakaan-kecelakaan kecil di jalan kampung lantaran kurang sadarnya masyarakat mengenai ketertiban berlalu-lintas (tiblantas). Masalah-



KR-Haryadi

Iptu Setyo Budi

masalah yang sebenarnya penting terkadang kurang diseriusi sehingga menjadi penyebab terjadinya laka lantas. Salah satu yang menjadi perhatian petugas adalah masalah penggunaan helm pengaman. “Karena merasa hanya

bepergian antarkampung, pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm,” jelas Setyo Budi.

Selain masalah perlengkapan kendaraan bermotor, Setyo Budi juga menyampaikan pentingnya kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara sepeda motor dan mobil. Ini berkaitan dengan batas umur minimal seseorang berhal mendapatkan SIM, yakni paling sedikit 17 tahun. Jika belum genap 17 tahun, tentu saja seseorang belum berhak memiliki SIM sebagai bukti kecakapan mengendarai kendaraan bermotor. Setyo Budi melihat tidak sedikit anak-anak yang umurnya masih di bawah 17 tahun sudah berkendara di jalan raya, sehingga sering mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. Situasi arus lalu lintas di jalan raya berbeda jauh dengan kondisi lalu lintas

di jalan-jalan kampung. Pengendara sepeda motor yang belum memiliki SIM terkadang ‘kaget’ ketika menghadapi kepadatan arus lalu lintas di jalan raya, sehingga berpotensi terjadinya laka lantas. Setyo Budi mengajak semua pihak untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, dan aman demi terwujudnya kenyamanan dan keselamatan lalu lintas. Terkait hal itu, selain mengadakan edukasi mengenai tiblantas, pihaknya juga akan melakukan penertiban terhadap pengendara sepeda motor maupun pengemudi mobil yang tidak menaati aturan lalu lintas. Setiap pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh pengendara motor dan pengemudi mobil, pasti dikenai sanksi. Hanya saja, sanksi yang diberikan tentunya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. (Hrd)

PLN Pulihkan Listrik Pasca Banjir

SEMARANG (KR)- Pascabanjir di Semarang selama dua hari, PLN berhasil menulihkan listrik masyarakat yang terdampak. Senior Manager General Affairs PLN Unit Induk Jateng- DIY, Elly Otaviani Ciptati dalam siaran persnya, Senin (8/2) mengatakan PLN berupaya mengutamakan keselamatan warga yang terdampak dengan menghentikan sementara aliran listrik. Pada daerah-daerah yang masih terendam banjir, PLN meng-

hentikan sementara aliran listrik. Setelah banjir surut dan dipastikan aman listrik baru bisa dinyalakan.

Sampai Sabtu (6/2) pukul 13.00 WIB PLN berhasil memulihkan 64% gardu distribusi pelanggan. Sebanyak 692 dari 1.069 unit gardu distribusi yang terdampak banjir berhasil dipulihkan.

PLN terus memantau daerah-daerah yang berdampak agar dapat segera menormalkan kem-

bali pasokan listrik apabila kondisi telah aman bagi masyarakat. Menurut BMK tertanggal 7 Februari 2021 Kota Semarang dan Pantura diperkirakan terjadi hujan lokal seta hujan dengan intensitas sedang. Untuk itu PLN mengimbau kepada warga agar tetap waspada terhadap potensi bencana, dengan cara memastikan instalasi listrik di dalam rumah dan memindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. (Fre)



Mimbar Legislatif



Perketat Mekanisme Karantina Hasil Pertanian

SEKRETARIS Komisi B DPRD Jawa Tengah Muhammad Ngainirichard menginginkan ada mekanisme karantina serta pendataan secara baik setiap produk pertanian, perikanan, peternakan hingga hewan peliharaan yang masuk di Provinsi Jawa Tengah. Dengan mekanisme secara ketat, segala jenis produk yang ke luar masuk daerah dapat teridentifikasi jelas. Dengan demikian bila ada yang membawa bakteri penyakit bisa segera teratasi.

Komisi B DPRD Jawa Tengah sudah melakukan pemantauan secara langsung bagaimana proses karantina di Balai Karantina Kelas II di Yogyakarta. Proses pemeriksaan di Balai Karantina Kelas II di Yogyakarta tergolong sangat ketat, karena di Yogyakarta tidak ada pelabuhan, sehingga barang ke luar masuk hanya melalui Bandar Internasional

Proses karantina me-



KR-Budiono

Muhammad Ngainirichard.

Yogyakarta. Atas dasar itulah, kecil kemungkinan pemeriksaan di karantina tidak perfeks.

Komisi B DPRD Jawa Tengah melihat langsung bagaimana Balai Karantina Kelas II di Yogyakarta memproses semua yang akan masuk dan ke luar di daerah Yogyakarta. Selain itu, adanya Balai Karantina Kelas II di Yogyakarta bisa mendukung penjualan produk daerah yang akan diekspor jika memang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Proses karantina me-

rupakan kepatuhan terhadap UU No 21/ 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang mengatur proses secara lengkap dengan tujuan meningkatkan kapasitas produk asli masyarakat. Karena itulah, mekanisme pengkarantinaan harus diperketat dengan tujuan hasilnya maksimal dan positif.

Komisi B DPRD Jawa Tengah juga menginginkan balai karantina yang ada di Jawa Tengah dapat menerapkan hal serupa, karena selain dari segi wilayah luas dengan beberapa pelabuhan dan dua bandar udara, setidaknya dapat memfilter jenis hewan, ikan dan tumbuhan yang masuk ke provinsi ini. (*)

(Disampaikan oleh Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah Muhammad Ngainirichard kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman)



KPID Harus Mampu Bendung Siaran Bermuatan Intoleransi



KR-Budiono

Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto saat memberikan wejangan kepada calon anggota KPID Jawa Tengah.

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto dan anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Masruhan Samsurie, minta kepada anggota komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, untuk membendung adanya siaran-siaran baik di radio maupun di televisi yang bermuatan intoleransi.

Hal ini disampaikan Bambang Kusriyanto dan Masruhan Samsurie secara terpisah kepada wartawan di Semarang Senin (8/8). Sebelumnya, pada Jumat (5/2), Ketua DPRD Jawa Tengah juga menerima audiensi tujuh orang calon Komisioner terpilih KPID Jawa Tengah di ruang kerjanya. Para komisioner melakukan audiensi didampingi Kepala Dinkominfo Jateng Riena Retnaningrum bersama jajarannya.

Dalam perbincangan yang santai itu, Bambang mengucapkan selamat kepada para calon ko-

misioner yang sudah terpilih. Ia berharap komisioner KPID yang baru tersebut bisa menjalankan kinerjanya dalam pengawasan penyiaran daerah secara optimal.

“Saya ingin tindakan-tindakan yang dilakukan para komisioner KPID Jawa Tengah ini mengarah kepada pencegahan siaran yang berbahaya intoleransi. Saya minta KPID benar benar mengawal siaran-siaran dari daerah. Jika ada persoalan yang berbahu SARA harus bisa diantisipasi,” tegas Bambang Kusriyanto.

Bambang berpesan kepada KPID Jawa Tengah agar dapat berperan aktif memajukan dunia penyiaran di provinsi ini, baik siaran di televisi maupun radio. Semua yang menjadi program siaran benar-benar bisa mengedukasi masyarakat. Dengan peran itu, KPID benar-benar dapat menjadi salah satu lembaga yang bisa memajukan pembangunan di

Jawa Tengah. “Untuk itu KPID harus mampu berperan, jangan hanya asal didirikan saja tapi nggak ngapa-ngapain,” tutur Bambang Kusriyanto.

Masruhan Samsurie mengatakan, dibutuhkan kemampuan dari para komisioner KPID Jawa Tengah untuk bisa mengawal dunia penyiaran di Jawa Tengah. Juga dibutuhkan sikap tegas terhadap lembaga penyiaran yang melanggar, termasuk menyiarkan program yang berbahu intoleransi.

“Komisi A DPRD Jawa Tengah telah menetapkan tujuh orang anggota KPID Jawa Tengah periode 2021-2024. Kami berharap mereka yang terpilih serius dalam menata dunia penyiaran di Jawa Tengah, sehingga dunia penyiaran di Jawa Tengah benar-benar menjadi dunia edukasi bagi masyarakat,” tutur Masruhan.

Kepala Dinkominfo Pemprov Jawa Tengah

Riena Retnaningrum berharap KPID nantinya bisa bersinergi dengan DPRD dan Pemprov Jawa Tengah untuk membangun penyiaran yang lebih berkualitas bagi masyarakat Jawa Tengah. “Ke depan KPID bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan Ketua DPRD untuk menyikapi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pengawasan penyiaran,” tutur Riena.

Komisi A DPRD Jawa Tengah telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit & proper test) terhadap calon anggota KPID masa jabatan 2021-2024 pada 29-30 Januari 2021 lalu. Dari 14 calon, terpilih tujuh orang calon. Ketujuh nama terpilih adalah Anas Syairul Alim, Sonakha Yuda Laksono, Muhammad Aulia As-syadin, Ari Yusmirandah, Asih Budiastuti, Yogyo Susaptoyono, dan Achmad Junaidi. (Adv / Budiono)